

EFEKTIVITAS PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN UMKM DAMPAK COVID-19, DI KELURAHAN PANGKALAN MASYHUR

Oleh:

Parulian Sianturi ¹⁾

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan ²⁾

Syukurman Halawa ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1 2 3)}

E-mail:

Paruliansimatupang89@gmail.com ¹⁾

dolipanjaitan@gmail.com ²⁾

syukurmanhalawa@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the village government in increasing the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) due to the impact of Coronavirus Disease 19 (Covid-19) and the factors that inhibit the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pangkalan Masyhur Village, Medan Johor District . This type of research is qualitative research, which is analyzed descriptively by reducing, narrating and drawing conclusions, data collected by interview, documentation and observation. The results of this study are that the effectiveness of the Pangkalan Masyhur sub-district government in increasing the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has been fairly effective, achieving goals in the form of implementing programs, strategies, and outreach, controlling and providing facilities and infrastructure which are also carried out based on policy formulation and planning which is fairly mature so as to provide easy, effective and efficient services. The inhibiting factors are the lack of personnel, funds, orderliness of business actors and the lack of persistence of business actors to develop their business. While the problems felt by the community are limited capital, income that has not recovered and still a lack of employees.

Keywords: *Kelurahan Government Effectiveness, MSME Growth, Impact of Covid-19*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dampak *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* dan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yang dianalisa secara naratif deskriptif yaitu dengan mereduksi, menarasikan dan menarik kesimpulan, data dikumpulkan secara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa efektivitas pemerintah kelurahan Pangkalan Masyhur dalam meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah terbilang efektif, pencapaian tujuan berupa pelaksanaan program, strategi, dan sosialisasi, pengendalian serta menyadikan sarana dan prasarana yang juga terlaksana berdasarkan perumusan kebijakan dan perencanaan yang terbilang matang sehingga memberikan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien. Adapun faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya personal, dana, ketertiban pelaku usaha dan kurangnya kegighan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. Sedangkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat yaitu keterbatasan modal, pendapatan yang belum pulih dan masih kurangnya karyawan.

Kata Kunci : *Efektifitas Pemerintah Kelurahan, Pertumbuhan UMKM, Dampak Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 terjadi sebuah wabah penyakit yang menyebar secara global yaitu Covid-19. Indonesia juga terdampak pandemi Covid-19. sebagaimana laporan jurnalis Tirto.id (30 April 2020), berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, total kasus positif Covid-19 di Indonesia, sebanyak 10.118 kasus, Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 21.827 kasus, Orang Dalam Pengawasan (ODP), 230.411 kasus. Wabah itu juga menyebar secara nasional termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Dalam laporan CNN Indonesia.com, (30 April 2020) Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatra Utara Aris Yudhariansya mengatakan “saat ini ada 12 kabupaten/ kota yang telah terpapar virus corona. Keduabelas daerah tersebut antara lain Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Pematang Siantar, Asahan, Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Kota Binjai dan Tebingtinggi. Menurut Aris Yudhariansa 12 daerah itu masing-masing ditemukan pasien positif Covid-19. Namun sebaran terbanyak berada di Medan 86 orang positif Corona, diikuti Deliserdang sebanyak 12 orang, dan Simalungun dan

Pematangsiantar masing-masing ada 3 orang yang positif”. Aris juga menerangkan akan menerapkan sistem isolasi berbasis klaster untuk menekan penyebaran virus corona di Medan. “Untuk di Medan pada 1 Mei 2020, akan mulai menerapkan karantina kesehatan penanganan Covid-19 dengan sistem *cluster isolation*. Semoga bisa menekan penyebaran, sekaligus langkah ini menjadi *role model* bagi kabupaten/kota lainnya untuk cepat mengantisipasi penyebaran virus”.

Pangkalan Masyhur adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang juga terdampak pandemi. Dampak pandemi dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), baik sebagai pemilik dan tenaga kerja. Berdasarkan observasi awal peneliti, di kelurahan tersebut terdapat banyak UMKM, yang merupakan mata pencaharian utama yang berkurangnya jumlah pembeli, pendapatan yang menurun, dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Banyak UMKM yang tutup atau mengurangi jam kerja, untuk menyesuaikan dengan kondisi dan sebagai upaya memerangi pandemi.

Pemerintah berupaya mengatasi dampak

Covid-19 terutama dibidang ekonomi dengan berusaha memulihkan keadaan ekonomi. sebagai sebuah organisasi ekonomi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, membantu pertumbuhan dan peningkatan pertumbuhan UMKM, dapat menjadi langkah tepat untuk memulihkan ekonomi. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi (Winardi, 2017:12), adalah “organisasi-organisasi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa sebagai imbalan dan pembayaran dalam bentuk tertentu. Organisasi ekonomi pada umumnya termasuk dalam organisasi informal jika dilihat dari ciri-ciri organisasi”. Disamping organisasi informal sebagian organisasi ekonomi juga ada yang bersifat formal yang dibentuk dengan landasan oleh lembaga yang bersangkutan. Organisasi-organisasi seperti organisasi informal inilah yang mendominasi perekonomian di Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang berjajar disekitar jalan. Misalnya jalan Jenderal AH Nasution yang ramai lalulintas pengendara setiap hari.

Pemerintah merupakan organisasi formal termasuk juga pemerintah kelurahan yang terstruktur, memiliki sistem, dan manajemen tata laksanakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Efektivitas Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Pertumbuhan**

sesuai landasan yang dibentuk baik dalam pelaksanaan maupun dalam pembentukan. Organisasi Formal (Winardi, 2017:89) “pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang berorientasi pada tujuan yang dibentuk guna mengakomodasi para upaya-upaya individu-individu dan kelompok-kelompok didalamnya”. Pada dasarnya organisasi formal berprinsip pada sebuah tata kelola pelaksanaan yang baik, salah satunya prinsip efektif. Efektivitas pemerintah kelurahan merupakan sebuah upaya mencapai tujuan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai program dan strategi. Oleh sebab itu secara keseluruhan entitas pemerintah kelurahan berorientasi pada fokus masalah pandemi Covid-19, yang program dan pencapaian tujuan tersebut dikonstruksikan dengan kondisi yang terjadi. Dalam kondisi demikian, fokus pemerintah kelurahan yaitu meningkatkan pertumbuhan UMKM dampak Covid-19.

Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti melaksanakan penelitian mengenai efektivitas pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan menulis bentuk **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dampak Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kelurahan Pangkalan**

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Defenisi Efektivitas

Efektiivtas merupakan kemandjuran sesuatu (upaya), mencapai tujuan. Menurut Mardiasmo (Apriyanti, 2018) efektivitas adalah “ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”. Kemandjuran upaya-upaya ditentukan oleh ukuran-ukuran dalam mencapai tujuan. Adanya sebuah rancangan untuk mencapai tujuan tersebut, yang disebut dengan perencanaan. Komaruddin (Julianto, 2021:685), efektivitas adalah “suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditatapkam terlebih dahulu”.

b. Indikator Efektivitas

Dalam sebuah organisasi formal efektivitas yaitu pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sarana dan presarana yang ada. Menurut Sigit (Nusution, 2018:10) efektivitas yaitu kemampuan untuk memilih pencapain tujuan dengan memanfaatkan sarana dan presarana yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Proses mencapai tujuan tersebut dimulai

- d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk

dari proses *input*, kemudian *process* hingga tahap *output*. Indikator efektivitas menunjukkan dampak (*autcame*) dari keluaran (*autput*), program (strategi) dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi *autput* semakin efektif upaya (kinerja) yang dilakukan oleh organisasi. Menurut Kurniawan (Riadi: 2020) Indikator efektivitas kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau uapaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan agar para impelemtator tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi seperti penentuan wawasan, waktu, dampak, dan pemusatan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang;

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut kesulitan mencapai sasarnya; dan
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Indikator-indikator tersebut merupakan suatu kesatuan, yang berhubungan satu sama lain. Sebuah organisasi melaksanakan program untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan program memerlukan sarana dan pengawasan. *Input* tersebutlah nantinya menentukan kualitas *output*, yang disebut dengan *output* program.

pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti laus. Dalam arti sempit “pemerintahan

c. Pemerintah Kelurahan

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari istilah *government*, yang berarti “pelaksana” dari sebuah kewenangan. Kata dasar *govern* atau disebut juga *governer* dalam bahasa Parancis, dan dalam bahasa Yunani *Kubernan* atau *to steer* yang berarti “pilot”, dan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan *kubera* yang berarti “kendaraan pengangkut”. Selanjutnya kata pemerintahan berhubungan dengan kata penganggaran (*direktion*), pengaturan (*regulation*) dan pengendalian (*control*). Oleh sebab itu pemerintah melakukan *control social* melalui pembentukan peraturan. (Thoha, 2012:116)

Haryanto dkk (Azfaiman, 2018:19), “mendefinisikan pemerintahan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara”. Pemerintah sebagai fungsional struktur terdiri dari fungsi-fungsi, berdasarkan sistem manajemen, menggunakan sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga dengan landasan-landasan yang disebut dengan pemerintahan. C.F Strong (Azfaiman, 2018:19) mengemukakan

sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan publik yang meliputi

kekuasaan eksekutif". Pemerintahan dalam arti luas yaitu "segala kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan publik yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif". Adapun badan-badan publik itu terdiri dari pemerintah tingkat pusat sampai pada unit-unit pemerintah terkecil ditingkat daerah. Badan-badan publik melaksanakan pemerintahan dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang vertikal dan horizontal.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Menurut Nurkolis (Nawawi dkk, 2018:31) kelurahan adalah "satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota". Dengan demikian, kelurahan sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah "wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya". Berdasarkan uraian diatas pemerintah kelurahan adalah perkumpulan dalam bentuk struktur fungsional yang mengurus urusan administrasi yang berada dalam sebuah kabupaten/ kota melalui kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan tentang kelurahan. Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan". Kedudukan kelurahan sebagaimana disebutkan pasal 25 ayat (1) dan (2):

- 1) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan diwilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah.
- 2) Selain menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Secara yuridis pemerintah kelurahan berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan diwilayah kelurahan, sebagai perangkat kecamatan, dan menerima tugas dari pemerintah kecamatan. Adapun tugas pemerintah kelurahan tercantum dalam pasal 25 ayat (3) Tugas Lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kelurahan melaksanakan tugas dengan menyusun sebuah struktur organisasi, setiap bagian dilimpahkan kepada bagian sesuai dengan fungsi masing-masing bagian. Dalam struktur juga terdapat staff fungsional, kesekretariatan, dan keuangan dalam melaksanakan program-program yang diberikan oleh atasan. Penyusunan fungsi kedalam bagian-bagian sesuai bidangnya masing-masing disebut dengan struktur organisasi kelurahan, sedangkan pembagian tugas-tugas lurah menjadi beberapa bagian dan dilimpahkan kepada bagian-bagian disebut dengan fungsi.

d. Usaha Mirko Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis organisai yang bergerak dibidang produksi, distribusi dan sampai pada penjualan barang, termasuk bentuk jasa. Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM) sebagaimana dikemukakan oleh A. Fadli dan barang, atau produksi dan distribusi,

(2021:31-32) adalah “aktivitas bisnis yang sanggup memperluas dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, menaruh pelayanan dan peningkatan ekonomi secara luas atau tinggi pada masyarakat, berperan pada proses pemerataan & peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional”.

Sebagai sebuah organisasi, UMKM termasuk dalam jenis organisasi ekonomi atau berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat dalam UMKM, organisasi tersebut dapat digolongkan kedalam bentuk bagian organisasi informal, yaitu organisasi yang fleksibel, luwes, dan tidak kaku meskipun memang terdapat kebijakan internal organisasi yang bersifat mengatur. W J S Poerwadarminta (Julianto dkk, 2021:677), organisasi yaitu “susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur”. Menurut James D. Money (Julianto dkk, 2021:677) organisasi adalah bentuk setiap persertikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. selanjutnya Chaster I. Bernard (Julianto dkk, 2021:677) mengemukakan organisasi merupakan “sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Oleh sebab itu, organisasi UMKM baik dalam bentuk jasa adalah organisasi yang segera dibentuk

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni tujuan yang berhubungan dengan bidang yang dikerjakan dalam organisasi.

Bagi organisasi yang dihadapkan pada sebuah tantangan akibat terjadi perubahan, penelitian yang dilakukan Putri dkk (Pariyem 2019:24) menyebutkan terdapat tiga indikator pengembangan usaha:

1. Motif berubah keadaan, berhubungan dengan inovasi yang dilakukan sesuai kebutuhan pasar;
2. Peluang untuk berkembang, sesuai dengan keadaan pasar memberi ruang bagi perkembangan usaha; dan
3. Tingkat kebutuhan pembinaan pihak luar, misalnya sosialisai yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan bagi para pemula yang ingin atau sedang memulai usaha.

Perubahan sosial merupakan perubahan yang cepat, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menyikapi perubahan sosial, peningkatan sektor UMKM perlu dilakukan. Proses megembangkan itu dapat dilakukan oleh eksternal organisasi, yaitu sosialisai yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan secara internal organisasi UMKM dapat malakukan inovasi misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

e. Covid-19

naratif. Hasil penelitian menunjukkan

Hasil riset yang dilakukan oleh Handayani (2020:121-122) virus corona atau *Severe Acut Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)*, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus yang disebut Covid-19, menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, seperti tenggorokan, dan paru-paru. Pada awalnya virus ini menyebar dari hewan (*zoonotik*) kemudian menyerang manusia. Virus menyebar melalui kontak (*droplet*) , sehingga terjadi gejala-gejala klinis. Virus berkembang dengan cara memeperbanyak diri melalui sel, yang disebut dengan *sel host*. Virus melakukan siklus hidup dalam organ pernapasan penderita, yang dimulai dengan bereplikasi di saluran sel epitel bagian atas, dan kemudian masuk pada sel organ pernapasan bagain bawah. Proses sel tersebut melakukan siklus hidup dinamakan dengan inklubasi.

f. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan peneltian yang relevan dengan penelitian ini;

1. Waryensi dkk (2022), degan judul Dampak Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kaulitatif yang di analisa dengan metode

pendapatan menurun akibat

masyarakat kesulitan mengakses pekerjaan. Masyarakat yang mayoritas petani memilih untuk tetap melakukan pekerjaan dengan cara mengurangi kapasitas pekerjaan, dan menunggu bantuan pemerintah.

2. WK Putri (2021), dengan judul Dampak Wabah Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM Kuliner Kota Jambi Kecamatan Alam Brajo. Jenis Penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif yang dianalisa secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan menurun, akibat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan atau bahan baku. Agar tetap bertahan, para pelaku UMKM melakukan aktivitas sebisa mungkin dengan kuantitas berkurang.

3. Mawar dkk, (2021:58-80) dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia pada Kondisi Ekonomi, Parawisata, Transportasi dan Kehidupan Sosial. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode analisa narasi. Hasil penelitian yaitu, PPKM sebagai cara mengatasi pandemi Covid-19 memberikan efek

wawancara. Rifa'i (2020:114),

langsung dan tidak langsung. Pada saat itu, sektor sosial, ekonomi, pariwisata, dan transportasi mengalami penurunan. Misalnya pengunjung ditenpat-tenpat wisata berkurang.

Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berkurangnya jam kerja dapat berimbas pada pendapatan masyarakat, kesulitan mendapatkan bahan baku juga berdampak pada proses yang terjadi pada sektor UMKM. Kondisi ekonomi mengalami penurunan, begitu juga dengan kondisi sosial masyarakat. Pengunjung tempat wisata juga mengalami penurunan yang ditandai dengan berkurangnya kapasitas pengendaraan menuju tempat-tempat wisata. Masyarakat memilih tetap bertahan meskipun kapasitas pekerjaan berkurang, dan menunggu bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu, "penelitian yang datanya berupa kata-kata, yang disusun menjadi sebuah rangkaian kalimat-kalimat yang saling terpadu, (Rifa'i, 2021:7). Data dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dokumentasi adalah "cara mengumpulkan

data dengan cara penelaan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sumber lain, yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti”. Observasi adalah “pengamatan terhadap fakta-fakta yang akan diteliti yang ditulis dalam sebuah dokumen yang dapat dijadikan sebagai data-data penelitian”. Menurut Rifa’i (2020:90) Observasi sistematis diartikan sebagai “observasi yang telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi”. Menurut Matias Siagian (2011:211) wawancara merupakan “cara mengumpulkan data dimana peneliti dan responden hadir dalam waktu dan tempat yang sama dalam rangka memperoleh data dan informasi dalam suatu penelitian”.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber informasi seperti informan dan objek observasi. Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber buku (*paper*). Data tersebut kemudian direduksi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan disimpulkan kedalam beberapa poin sesuai rumusan masalah penelitian.

a. Kejelasan Tujuan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Pangkalan Masyhur merupakan sebuah kelurahan yang terletak di jalan Karya Jaya No.44 Kecamatan Medan Johor, dengan luas wilayah 4 ha, yang terdiri dari satu vasilitas kantor dan terbagi kedalam 15 (lima belas) lingkungan. Kelurahan ini berbatasan dengan beberapa kelurahan. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia; sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gedung Kecamatan Medan Johor; sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kwala Bekalan, Kecamatan Medan Johor.

Efektivitas Pemerintah Kelurahan

Pangkalan Masyhur

Efektivitas Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Masyhur dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM, berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberdayakan, melatih dan membina masyarakat. Pemerintah kelurahan juga berupaya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan juga termasuk masyarakat usaha.

Tujuan dari pemerintah Kelurahan

Pangkalan Masyhur yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai dengan visi dan misi kelurahan tersebut yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Pangkalan Masyhur yang Berkah Maju dan Kondusif”.

Misi:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berkah, berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan prima sesuai ketentuan yang berlaku,
2. Menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan kualitas kehidupan masyarakat, dan
3. Berkolaborasi dengan instansi terkait serta semua unsur dalam mewujudkan keamanan dan keberhasilan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang kondusif.

Pemerintah kelurahan hendak mewujudkan masyarakat yang berkah, maju dan kondusif, lewat tatakelola pemerintahan yang efektif, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan berkolaborasi dengan instansi untuk mewujudkan masyarakat yang kondusif.

b. Pelaksanaan Program

selama pengurusan penerimaan bantau.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pangkalan Masyhur yaitu melaksanakan program PPKM untuk mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19. Program ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan UMKM. Para pelaku usaha melakukan kegiatan dengan tetap mematuhi himbauan-himbaun pemerintah, menyediakan alat cuci tangan, dan alat tes suhu tubuh. Pemerintah juga menekankan agar masyarakat termasuk pelaku usaha mengikuti vaksinasi. Penyaluran bantuan sosial juga mengikutsertakan kontribusi pemerintah kelurahan. Selain karena menyediakan kebutuhan sehari-hari, UMKM juga mata pencaharian utama di kelurahan tersebut.

c. Strategi dan Pencapaian Tujuan

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pangkalan Masyhur yaitu mengusulkan masyarakat dan pelaku UMKM terutama ekonomi lemah, agar mereka mendapatkan bantuan sosial dan bantuan modal usaha. Pemerintah kelurahan melakukan pendataan bagi usaha yang dikategorikan mendapatkan bantuan sosial atau bantuan lainnya. Pendampingan bagi masyarakat pada saat mengurus data-data termasuk menyediakan data-data yang dibutuhkan

Penyaluran bantauan sosial sesuai dengan

katagori atau jenis UMKM. Oleh sebab itu jenis bantuan yang disalurkan bermacam-macam sesuai dengan jenis UMKM, misalnya bantuan modal usaha bagi toko kelontong dan bantuan langsung tunai bagi bagi kedai.

Pemerintah kelurahan memotivasi masyarakat untuk membuka usaha kreatif. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat lewat program-program yang telah dilakukan. Misalnya program pelatihan bagi masyarakat yang tergabung dalam organisasi PKK dan Keluarga Harapan. Program ini merupakan cara untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan UMKM. Sebagai bentuk respon terhadap perubahan sosial yang terjadi, agar UMKM mampu bertahan ditengah kesulitan, dan menemukan alternatif usaha sesuai keadaan masa sekarang.

d. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan proses analisa kebijakan yang mantap, yang didasarkan pada pencapaian tujuan dan strategi yang telah ditentukan. Perumusan kebijakan ini juga bertujuan untuk menjembatani tujuan dengan usaha-usaha yang telah ditentukan. Adapun perumusan kebijakan yang sudah terselenggara dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan sebagai program yang dimasukkan dalam

yaitu kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). kebijakan ini dirumuskan dalam bentuk program bagi UMKM termasuk UMKM yang ada di kelurahan pangkalan Masyhur. Bagi UMKM yang sudah mendapatkan izin berhak menerima bantuan-bantuan sosial, pinjaman modal dan bentuk bantuan lainnya termasuk merangsang UMKM dengan berbagi stimulus-stimulus yang mendukung berlangsungnya kegiatan UMKM.

e. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi merupakan upaya untuk menyampaikan nilai-nilai yang bermanfaat terhadap masyarakat, transfer nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi berikutnya atau antar generasi sebagai upaya berkelanjutan terhadap nilai-nilai yang sudah ada. Bentuk sosialisasi pada saat pandemi ini yaitu pelatihan pembinaan atau bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan UMKM mampu menciptakan inovasi. Selain itu kegiatan tersebut juga untuk memotivasi masyarakat agar mampu menciptakan usaha baru pada saat terjadinya perubahan misalnya pada saat pandemi Covid-19.

Kegiatan ini merupakan sebuah program pemerintah kelurahan sendiri sesuai dengan visi misinya. Pemerintah kelurahan sendiri menjadikan UMKM, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG). Muasyarah ini merupakan mempersiapkan dan merencanakan kegiatan pembangunan di satu tahun yang akan datang. Juga sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan yang sudah dilakukan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pencapaian kegiatan berupa Bimtek UMKM, pembuatan kripik, bunga hias hingga pelatihan pembuatan aksesoris. Selalu mematuhi protokol kesehatan, pemerintah kelurahan berupaya untuk memotivasi warga dalam bentuk pelatihan tersebut. Kemunculan usaha baru dan usaha yang mampu bertahan seperti usaha keripik payak, usaha kedai *koffie*, dan usaha *online*. (Ekpose Kelurahan Pangkalan Masyhur, 2022:19-20).

f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah kelurahan melaksanakan tugas dalam sebuah fasilitas kantor. Ketersediaan sarana dan prasarana pada saat perizinan kemudian data disampaikan ke Dinas Sosial. Bentuk UMKM yang sudah NPWP (Nomor Penerima Wajib Pajak), menyeleksi bantuan modal usaha atau bantuan pinjaman modal, bagi UMKM yang sudah terkategori mendapatkan bantuan. Masyarakat datang ke kantor kelurahan mengurus data-data perizinan atau data yang menekankan UMKM terkait masuk.

dibutuhkan penerima bantuan sosial, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Peralatan tersebut diantaranya alat tes suhu tubu, masker, alat cuci tangan, dan disinvektan. Pemerintah kelurahan juga menyediakan fasilitas tersebut pada saat pelaksanaan vaksinasi, menyediakan sarana berupa alat tes suhu tubu, *repied test*, alat pelindung diri, jarum suntik, vaksin dan perlengkapan lainnya.

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pelaku usaha. Usaha tersebut memperhatikan strategis tempat, atau mempertimbangkan akses ketempat usaha. Oleh sebab itu jalan merupakan sarana yang penting mendukung kelancaran kegiatan usaha. Berhubungan dengan permasalahan jalan dan akses, pemerintah kelurahan melakukan pengecoran jalan menggunakan dana kelurahan. Seperti jalan Karya Tani gang Banteng, jalan Karya Muda dan jalan Karya Utama pada tahun 2021-2022. Tujuannya untuk memelihara jalan atau optimalisasi fungsi jalan terhindar dari banjir, genangan dan kenyamanan pengendara.

Pemerintah kelurahan juga mendorong masyarakat yang memiliki UMKM agar masuk ke E-Katalog. E-Katalog merupakan sebuah sarana *online* yang menyediakan layanan pengadaan barang dan jasa. Layanan ini disediakan oleh Pemko Medan, Dalam Ekpose Kelurahan Pangkalan

Masyhur (2022:20), ada 7 (tujuh) UMKM yang sedang dalam proses masuk E-Katalog pada bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Medan. Ketujuh UMKM tersebut terdiri dari Elna Jepara, Gren Arby, Lintang Mas, Pondok Kue Nabila, Bengkel Kubah, Denny Eskrim, dan Arma Anugerah Abadi. Layanan ini diharapkan mampu manjangkau masyarakat yang ingin membutuhkan produk tertentu. Layanan ini juga mempermudah proses pembelian dan penjualan sekaligus mempromosikan produk-produk lokal.

g. Pengawasan dan Pengendalian

Bentuk pengawasan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Pangkalan Masyhur yaitu dengan cara melakukan pendataan bagi UMKM yang sudah berbentuk satu tim. Hasil pendataan akan diajukan ke Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan UKM, agar mereka mendapatkan bantuan. Pada saat melakukan pendataan tersebut pihak pemerintah kelurahan juga menjaga ketertiban masyarakat dan pelaku UMKM. Pemerintah kelurahan juga mengusulkan UMKM yang sudah izin usaha, dan NPWP agar bergabung dengan layanan E-Katalog, sebuah layanan yang disediakan oleh pemerintah kota medan. Berdasarkan hasil riset dokumentasi dalam Ekspose Kelurahan Pangkalan Masyhur, (2022:20) dirasakan oleh masyarakat termasuk juga

dijelaskan ada tujuh UMKM yang sudah dalam proses masuk UMKM. Jadi ada bentuk koordinir antara pemerintah kelurahan dengan dinas.

h. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Untuk mempermudah pelaksanaan program organisasi, tentunya mesti dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan juga didahului pertimbangan sesuai perumusan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif dan efisien ini dapat dilihat dari besaran pendapatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya sebuah tindakan terkait kebijakan-kebijakan. Semakin efektif dan efisien pelaksanaan, semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapatkan hasil. Adapun program-program dan tindakan yang telah dilakukan berhubungan dengan tindakan mencapai pemulihan ekonomi, dan peningkatan pendapatan UMKM. Hal ini juga sebagai upaya berupa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan, pendapatan UMKM meningkat secara perlahan. Meskipun belum menunjukkan keseimbangan terhadap kondisi sebelum pandemi Covid-19, kontribusi pemerintah lewat kelurahan dapat

para pelaku UMKM. Kemudahan perizinan,

pengurusan data hingga sampai penyaluran bantuan menjadi faktor-faktor mendukung keberlangsungan UMKM. Selain itu penekanan terhadap percepatan penegangan Covid-19 sehubungan dengan diterapkannya PPKM, dan tetap memperhatikan keberlangsungan UMKM, misalnya pengaturan jam kerja, kemudahan menjangkau vaksinasi, dan himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan. Pelaksanaan PPKM, sampai pada dilonggarkannya kembali, serta bantuan-bantuan yang disalurkan, beberapa penjual mengaku merasakan peningkatan pendapatan, dan juga mengapresiasi tindakan-tindakan tersebut.

i. Perencanaan yang Matang

Setiap program sebenarnya sudah didahului oleh perencanaan. Begitu juga dengan startegi dan kebijakan sudah didahului oleh perencanaan. Sebagai sebuah organisasi formal, pemerintah kelurahan Pangkalan Masyhur sudah melaksanakan kebijakan yang direalisasikan dalam bentuk program dan strategi. Program tersebut merupakan program yang baru pada saat terjadi pandemi Covid-19, sebagai respon terhadap kondisi UMKM. Adapun program pelatihan dan pembinaan merupakan program sudah sejak lama dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang didasari segala urusan yang berhubungan dengan UMKM.

mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pelaku Usaha. Pendataan terkait perizinan, pelatihan terkait inovasi, dan motivasi untuk mendorong UMKM masuk dalam layanan E-Katalog Pemko Medan.

Faktor-Faktor Penghambat

Pertumbuhan UMKM

Faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM di Kelurahan Pangkalam Masyhur yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk mata pencaharian utama di Kelurahan Pangkalan Masyhur, berasal dari UMKM. Sesuai riset dokumentasi dalam buku Ekspose Kelurahan Pangkalan Masyhur (2022:20), jumlah lembaga perekonomian terdiri dari 6 (enam) koperasi simpan pinjam, 4 (empat) bank pemerintah, 2 (dua) pegadaian, 27 (dua puluh tujuh) restoran dan rumah makan, 211 (dua ratus sebelas) industri makanan, jadi total 250 (duaratus lima puluh) lembaga perekonomian. Adapun UMKM ini merupakan bagian dari visi misi strategis pemerintah kelurahan. Oleh sebab itu dibutuhkan penambahan personal untuk melakukan pendataan lapangan, pelatihan, pembinaan dan
2. Pemerintah kelurahan berencana terus melaksanakan program pelatihan dan

pembinaan UMKM. Perbaikan jalan seperti pengecoran, untuk memperlancar akses UMKM sekaligus kenyamanan pengguna jalan, dan antisipasi terhadap genangan. Pelaksanaan pengecoran jalan ini menggunakan dana kelurahan. Oleh sebab itu dibutuhkan dana yang cukup untuk membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM ini. Keterbatasan dana kelurahan untuk membiayai program dapat menjadi kendala upaya pertumbuhan UMKM.

3. Pemerintah kelurahan mempermudah perizinan usaha. Masyarakat yang mengurus izin usaha tetapi tidak gigih untuk mengembangkannya, sehingga usaha tersebut sudah tidak ada lagi. Selain itu juga terkait ketertiban usaha, UMKM mendirikan usaha tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penjual terkadang mendirikan usaha ditempat yang tidak sesuai mengganggu ketertiban umum.
4. Faktor penghambat pertumbuhan UMKM yaitu berhubungan dengan analisis SWOT (*Steringht, Wekenes, Oppprtunities, threats*). Masing-masing artinya yaitu kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman). kurang, selain itu juga masalah strategis tempat;

Adanya faktor-faktor yang tidak berarti atau tidak berfungsi. Beberapa faktor tersebut ada yang mendukung dan ada yang menghambat, ada berasal dari dalam (Internal) organisasi dan ada juga yang berasal dari luar (ekternal) organisasi.

Faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM yang dialami oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya modal. Untuk mengembangkan usaha, memerlukan modal yang cukup misalnya mereka yang ingin meperluas usaha saja akan membutuhkan kapasitas pekerja, dan unit lainnya seperti kapasitas barang.
2. Pendapatan yang masih kurang. Masyarakat yang mendirikan usaha masih merasakan bahwa pendapatan mereka masih berkurang karena dampak Covid-19 masih ada dan belum pulihnya kondisi ekonomi 100% (seratus persen). Pendapatan yang diperoleh, selain untuk modal usaha, juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak;
3. Daya beli masyarakat. Masyarakat pemilik UMKM masih merasakan dampam Covid-19, yaitu jumlah pengunjung atau pembeli masih
4. Jumlah karyawan. Akibat adanya Covid-19, beberapa usaha mengurangi

jumlah karyawan kerana pendapatan yang berkurang. oleh sebab itu beberapa usaha mengalami kekurangan tenaga kerja.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kacil dan Menengah (UMKM) dampak *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor sesuai hasil dokumentasi, observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Kelurahan Pangkalan Masyhur dalam membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM sudah efektif. Proses mencapai tujuan organisasi pemerintahan, melaksanakan program seperti program bantuan sosial, PPKM hingga program pelatihan yang dilaksanakan dengan strategi pendataan, PPKM yang memperhatikan kepentingan UMKM sampai strategi sosialisasi berupa pelatihan dan pembinaan. Program-program tersebut merupakan bagian dari perumusan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau upaya ketertiban umum. Dapat dikatakan adanya faktor-faktor yang belum

untuk meningkatkan pertumbuhan. Melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian melalui koordinasi dengan instansi terkait, yang memanfaatkan sarana dan prasarana seperti vasilitas kontor dan fasilitas penunjang program PPKM. Perencanaan yang matang berupa program-program mengaplikasikan pelayanan yang mudah efektif dan efisien. Adapun program yang akan terus dilaksanakan yaitu sosialisasi UMKM, perbaikan jalan dan pendataan.

2. Keterbatasan personel merupakan permasalahan yang dialami pemerintah kelurahan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM. Adanya program sosialisai ataupun pendataan, membutuhkan personal yang cukup. Faktor lain yaitu keterbatasan dana kelurahan untuk mendanai program-program yang ada seperti program pengecoran jalan. Adanya pelaku usaha yang yang mengurus izin tetapi tidak mampu mengembangkan atau menjalankan usaha dan adanya pelaku usaha yang masih belum memperhatikan berfungsi secara maksimal berhubungan dengan analisa SWOT

(*Strenght, weaknesses, opportunities, dan threats*), yaitu adanya faktor yang tidak berfungsi atau menghambat pertumbuhan UMKM baik dari dalam dan dari luar organisasi atau instansi. Sedangkan faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM yang dirasakan oleh masyarakat yaitu keterbatasan modal mengingat usaha membutuhkan modal yang cukup seperti modal pengambagan usaha atau modal mendirikan usaha baru. Pendapatan yang sempat menurun, maka beberapa UMKM memilih mengurangi jumlah karyawan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

1. Pemerintah kelurahan melanjutkan program dan strategi yang dapat mengembangkan UMKM. Mencari alternatif untuk membantu mengatasi keterbatasan misalnya pendanaan dan personel. Memperhatikan lokasi, akses dan ketertiban UMKM.
2. Masyarakat mengembangkan potansi lokal, mengikuti program-program dan arahan pemerinah. Mendirikan dan mengembangkan usaha secara tertib, memperhatikan ketertiban umum. Menitipbaratkan nilai estetika, (<https://.org/10.31933/jimt.v2i5.592>)

juga memperhatikan penataan UMKM, rapi dan kondusif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suaka Press, Yogyakarta

Siagian, Matias, 2011. "*Metode Penelitian Sosial: Pedoman Praktis Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Kesehatan*". Pt. Grasindao Monoratama, Medan

Winardi, J. 2017. *Teori Organisasi dan Pengornasasian*. PT. RajaGravindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Jurnal

Julianto, Bagus dkk. *Faktro-Faktro yang Mempengaruhi Organisasi Propesional: Kepemimpinan, Kominikasi Efektif, Kinerja, dan Efektivitas Organisasi (Suati Kajian Study Literalture Riview Ilmu Manajemen Terapan. JIMT. 2. 5. (Mei 2021). 17 Juni 2022*

Mawar dkk. *Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*

di
Indonesia .LPMJ UMJ. 08.-. (2021): 1-12.
Seminar Nasional Penelitian LPMJ
UMJ. 16 Mei2022
<<https://jurnal.ac.id/index.php/semaslit>>

Nawawi, M. DKK. “Study Kemungkinan
Perubahan
Status Teluk Kapuas menjadi
Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. Ilmu
Pemerintahan Suara Khatulistiwa”.
3. 1. (Juli 2018) 22 Mei 2022
(<https://ejournal.ipdn.ac.id/article.view>)

Putri, WK. *Dampak Wabah Covid-19 terhadap
Pendapatan UMKM Kuliner
Kota Jambi Kecamatan Alam Brejo.*
Repository UIN Jambi. 2021. UIN
Jambi. 24 Mei 2022
(<http://repository.uinjambi.ac.id/10041/1/WITA%20KHAMALA%20PUTRI%20%28501171806%29.pdf>)

Waryensli, Harun dkk. “Dampak Ekonom
Masyarakat Di Masa Pandemi
Covid-19 Di Distrik Kaimana Kabupaten
Kalimana Provinsi Papua Barat”.
Ilmiah Society. 2. 2. (2022) 23
Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten
Lombok Utara. UMMAT
Repository.2021.UMMAT. 17 Juni

Januari 2022
(<https://ejournal.unsrat.ac.id>)

Artikel

Apriyanti, Putri. *Efektivitas Pemberdayaan
Ekonomi
Pesantren dalam Perspektiv Ekonomi
Islam.*

Repository.radenintan.ac.id. 2017. Raden
Intan 12 Mei 2022
(https://scholar.google.co.id/scholar/?hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scolar#d=gs_qabs&t=1655086253596&u=%23p%3DbzWI4cAtX48J)

Azfaiman, A. *Study Kepustakaan dan
Karangan
Pikiran: Pengertian Pemerintah*
Repository UIR. 2018. UIR. 22 Mei 2022
(<https://repository.uir.ac.id>)

Fikri, Chairul. *Tiga Dampak Pandemi
Covid-19 Bagi
Perekonomian Nasional.*
www.beritasatu.com. Februari 2021.
Beritasatu. 21 Mei
2022(www.beritasatu.com)

Fadli, Ahmad. *Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap Pendapatan UMKM di Desa*
2022
(<http://repository.ummat.ac.id/id/id/eprint/2125>)

*12 Daerah d Sumatera Utara Terpapar
Virus Corona”*

.cnnindonesia.com. 2020.

Cnnindonesia. 23 Mei 2022

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331153618-20-488740/12-daerah-di-sumatra-utara-terpapar-virus-corona>)

Pariyem. *Variabel Determinan
Pengembangan UMKM*

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Pasar

Skondol. lib.unnes.ac.id. 2019.

Unnes. 15 Juni 2015.

(https://lib.unnas.id/7101415092_Optimized.pdf)